

Pengaruh Keterbukaan Informasi dan Kepatuhan Regulasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan: Analisis Berdasarkan Penilaian Pihak Ketiga di Indonesia (2020–2022)

Mela Nurdialy¹, Yuni Astuti Tri Tartiani², Marseli Chris Prihatiningtyas³, Haqi Fadilah⁴

¹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi IPB, Bogor, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

³ Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)

⁴ Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 4, 2025

Revised June 16, 2025

Accepted June 23, 2025

Keywords:

Kepatuhan Regulasi;
Keterbukaan Informasi;
Laporan Keberlanjutan;
Legitimacy Theory;
Stakeholder Theory.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan informasi keberlanjutan (Skor KK) dan kepatuhan terhadap regulasi POJK (Skor POJK) terhadap kualitas Sustainability Report (SR) perusahaan publik di Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Temuan menunjukkan bahwa SR memiliki potensi strategis dalam mendukung efisiensi manajemen, peningkatan tata kelola, serta penguatan keterlibatan pemangku kepentingan. Data yang digunakan berasal dari penilaian pihak ketiga atas lebih dari 100 laporan keberlanjutan perusahaan selama tiga tahun. Dengan pendekatan kuantitatif dan regresi Ordinary Least Squares (OLS), disertai uji asumsi klasik, penelitian ini menemukan bahwa baik keterbukaan informasi maupun kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas SR. Model regresi menunjukkan tingkat penjelasan sebesar 89%, dan lolos uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Temuan ini memperkuat stakeholder theory dan legitimacy theory dalam konteks akuntansi pelaporan berkelanjutan serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan tata kelola informasi dan peningkatan transparansi ESG di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Mela Nurdialy,
Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi IPB Bogor, Indonesia
Jl. Kumbang No. 14, Bogor, Jawa Barat 16128. Indonesia
Email: Melanu@apps.ipb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, pelaporan keberlanjutan telah menjadi elemen kunci dalam praktik akuntansi modern dan strategi perusahaan global. Sustainability report (SR) tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi eksternal, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Di tingkat global, standar seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mendorong adopsi pelaporan keberlanjutan yang lebih sistematis dan transparan (KPMG, 2022).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik menyampaikan laporan keberlanjutan secara berkala. Meskipun terjadi peningkatan jumlah SR yang disusun, kualitas dan kedalaman pengungkapan antar perusahaan masih sangat bervariasi (Permatasari et al., 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: faktor apa yang benar-benar mendorong kualitas pelaporan keberlanjutan?

Meskipun studi tentang pelaporan keberlanjutan telah banyak dilakukan, sebagian besar berfokus pada determinan internal seperti ukuran perusahaan, kinerja keuangan, atau struktur tata Kelola (Arkoh et al., 2024; Dewi et al., 2023; Hahn & Kühnen, 2013; Indana & Pangestuti, 2024; Wiharno et al., 2024). Studi yang secara langsung mengevaluasi pengaruh keterbukaan informasi (Skor KK) dan kepatuhan terhadap regulasi (Skor POJK) terhadap kualitas SR berdasarkan penilaian pihak ketiga masih terbatas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan longitudinal berbasis data tahun 2020–2022 dan menggunakan pengukuran objektif atas kualitas laporan oleh lembaga independen.

Penilaian dilakukan berdasarkan evaluasi pihak ketiga, yang berperan sebagai mekanisme assurance eksternal tidak formal namun objektif. Studi ini menambahkan literatur dengan memberikan bukti empiris dari Indonesia, negara berkembang dengan lanskap pelaporan ESG yang sedang berkembang dan dinamis. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menggabungkan stakeholder theory dan legitimacy theory untuk menjelaskan motivasi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh regulator, perusahaan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola informasi keberlanjutan yang kredibel.

Secara konseptual, penelitian ini memodelkan hubungan antara Skor KK dan Skor POJK terhadap total skor keberlanjutan sebagai variabel dependen. Roadmap penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari lembaga pihak ketiga, pengujian deskriptif dan asumsi klasik, analisis regresi OLS, dan interpretasi temuan dalam kerangka akuntansi pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat praktik pelaporan keberlanjutan yang berbasis pada akuntabilitas dan legitimasi institusional, termasuk untuk meningkatkan efisiensi manajerial dan tata kelola informasi perusahaan. Temuan lengkap penelitian ini disajikan dan dianalisis dalam bagian Hasil dan Pembahasan berikutnya.

Pelaporan keberlanjutan telah berkembang menjadi salah satu elemen sentral dalam praktik akuntansi modern, terutama dalam merespons tuntutan global terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan atas dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Pelaporan keberlanjutan menjadi instrumen penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja non-keuangan mereka kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Di negara berkembang seperti Indonesia, urgensi pelaporan keberlanjutan semakin meningkat, tidak hanya sebagai respon terhadap tekanan eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang (Alshbili et al., 2021; Dewa et al., 2024).

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu standar pelaporan ESG yang paling banyak digunakan secara internasional. Kerangka kerja GRI telah dirancang agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sehingga mendorong perusahaan untuk menyelaraskan kinerjanya dengan target pembangunan global (Ates, 2021). Di Indonesia, urgensi pelaporan ini diformalkan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan tahunan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidaksiapan sistem pelaporan, dan rendahnya kualitas assurance eksternal (Aly & Badawy, 2024; Damen, 2016).

Landasan teoretis dalam studi ini merujuk pada stakeholder theory dan legitimacy theory yang menjadi pilar penting dalam literatur akuntansi keberlanjutan. Stakeholder theory (Freeman, 2010; Davila, 2024) berangkat dari gagasan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab

kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan operasionalnya. Teori ini juga telah diperluas untuk menjelaskan dinamika dalam konteks digitalisasi dan strategi keberlanjutan (Laine et al., 2021). Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini mengasumsikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi ESG merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Sebaliknya, legitimacy theory menyoroti bahwa kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan dianggap sah di mata masyarakat (Deegan, 2002; Ogunode, 2022). Dengan demikian, perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa aktivitas mereka sejalan dengan nilai, norma, dan ekspektasi publik. Dalam banyak kasus, pelaporan ini digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan atau memperbaiki legitimasi yang mungkin terancam akibat krisis lingkungan atau tekanan dari aktivis. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini menjustifikasi bahwa perusahaan akan menyampaikan informasi keberlanjutan untuk mempertahankan eksistensinya dan kepercayaan publik (Laine et al., 2021).

Dalam konteks penelitian ini, integrasi stakeholder theory dan legitimacy theory menjadi dasar dalam menjelaskan motivasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Stakeholder theory menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan merupakan bentuk akuntabilitas kepada pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perusahaan. Sementara itu, legitimacy theory menekankan pentingnya perusahaan menyelaraskan aktivitas dan pelaporannya dengan norma sosial untuk mempertahankan legitimasi publik.

Sejalan dengan perkembangan akuntansi keberlanjutan, konsep materialitas ESG menjadi penting dalam menentukan isu mana yang perlu diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Dual materiality yang mencakup financial materiality dan impact materiality, memandu perusahaan untuk mengungkap informasi yang material tidak hanya bagi kinerja keuangan tetapi juga bagi dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menilai relevansi isu ESG dari dua dimensi yakni bagaimana isu tersebut memengaruhi masyarakat dan lingkungan (impact) serta bagaimana isu tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (financial) (Gutiérrez-Ponce, 2023).

GRI, sebagai standar internasional, secara eksplisit mendukung penerapan materialitas ini dan menyelaraskannya dengan pelaporan SDGs. Penelitian di Spanyol menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan GRI secara konsisten cenderung menunjukkan kinerja pelaporan yang lebih baik dalam hal pencapaian SDGs (Gutiérrez-Ponce, 2023). Integrasi ini memperkuat posisi SR tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen manajemen strategis keberlanjutan.

Third-party assurance atau jaminan pihak ketiga atas laporan keberlanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam Sustainability Report (SR). Standar internasional seperti ISAE 3000 dan AA1000AS telah menjadi acuan utama dalam pelaksanaan assurance keberlanjutan, khususnya dalam menilai keakuratan, keterandalan, dan keterverifikasian laporan ESG (Laine et al., 2021); (Aly & Badawy, 2024). Meskipun tidak diwajibkan seperti audit atas laporan keuangan, praktik third-party assurance telah mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan non-keuangan. Keberadaan assurance eksternal dipandang menambah nilai strategis, karena tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sinyal bahwa perusahaan serius dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola dan proses bisnisnya.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan assurance eksternal atas SR cenderung memiliki reputasi tata kelola yang lebih kuat dan memperoleh penilaian ESG yang lebih positif. Selain itu, third-party assurance juga mendukung penguatan sistem pengendalian internal dan meningkatkan integritas data ESG yang disampaikan, sehingga memperkuat fungsi SR sebagai alat manajemen risiko dan akuntabilitas strategis. Dalam literatur empiris, pelaporan ESG terbukti meningkatkan kinerja keuangan, kepercayaan investor, dan reputasi perusahaan (Burki et al., 2024; Dossa, 2025). Namun, pengaruh ini bersifat kontekstual dan sangat tergantung pada

sektor, dimensi ESG, dan wilayah geografis (Tamasiga et al., 2024). Di negara berkembang, tantangan seperti belum wajibnya jaminan pihak ketiga dan keterbatasan adopsi ISAE 3000 menyebabkan variasi dalam kualitas pelaporan (Harymawan et al., 2020; Khan et al., 2023). Penelitian oleh Aly & Badawy (2024) dan Damen (2016) juga menekankan pentingnya assurance eksternal dalam meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan telah menjadi alat penting bagi manajemen perusahaan, memengaruhi praktik internal dan persepsi eksternal. Pelaporan ini tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tata kelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain fungsi komunikatif, laporan keberlanjutan juga memainkan peran penting dalam penguatan sistem tata kelola dan peningkatan efisiensi manajerial. Bae & Cha (2024) menunjukkan bahwa pelaporan ESG berkorelasi positif dengan penguatan akuntabilitas internal, pengambilan keputusan yang berbasis data, serta peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan sering menggunakan pelaporan keberlanjutan sebagai respon strategis terhadap tekanan eksternal, termasuk dari investor institusi dan otoritas regulasi (Pérez-López et al., 2015).

Terkait kinerja keuangan, sejumlah penelitian melaporkan hasil yang positif, meskipun bersifat kontekstual. Pal (2024) menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan yang komprehensif berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun, studi oleh Mititean & Sărmaș (2023) di sektor energi Eropa menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak selalu konsisten antar industri atau negara. Laporan keberlanjutan juga berperan dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan. Okoye & Gbegi (2013) menekankan bahwa dengan mengidentifikasi indikator sosial-lingkungan utama, perusahaan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sekitar, regulator, dan konsumen. Faktor karakteristik perusahaan juga tidak dapat diabaikan. Nofita et al. (2024) dan Wang (2017) mengemukakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar, tata kelola korporasi yang kuat, kehadiran direktur independen, serta kepemilikan asing yang signifikan, lebih cenderung menyusun laporan keberlanjutan yang komprehensif dan strategis. Meskipun banyak bukti menunjukkan manfaat pelaporan keberlanjutan terhadap manajemen perusahaan, variabilitas dampaknya tetap tinggi. Lingkungan regulasi, sektor industri, dan ukuran perusahaan dapat membentuk efektivitas pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, implementasi pelaporan yang sukses memerlukan penyesuaian kontekstual yang cermat.

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan empiris yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara dua variabel independen yakni keterbukaan informasi keberlanjutan (Skor KK) dan kepatuhan terhadap regulasi POJK (Skor POJK) terhadap variabel dependen berupa kualitas Sustainability Report (Total Skor SR) yang dinilai oleh pihak ketiga secara independen. Secara teoritis, Skor KK merepresentasikan tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengungkapkan isu-isu ESG yang relevan kepada pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab informasi yang luas terhadap semua pihak yang terkena dampak dari aktivitas bisnisnya. Sementara itu, Skor POJK mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi formal (POJK No. 51/POJK.03/2017), dan berfungsi sebagai indikator legitimasi institusional sebagaimana dijelaskan dalam legitimacy theory.

Keterbukaan informasi dan kepatuhan regulatif merupakan dua mekanisme utama dalam membentuk kredibilitas dan kualitas laporan keberlanjutan. Kedua variabel independen diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap Total Skor SR, sebagaimana didukung oleh literatur terdahulu yang menekankan pentingnya tata kelola informasi dan transparansi regulatif dalam konteks pelaporan keberlanjutan. Dengan memasukkan indikator Skor KK dan Skor POJK sebagai variabel independen terhadap Total Skor SR (yang dinilai oleh pihak ketiga), maka kerangka konseptual ini mencerminkan hubungan antara praktik keterbukaan dan kepatuhan regulatif terhadap legitimasi organisasi dan nilai strategis informasi ESG yang dilaporkan serta kualitas pelaporan keberlanjutan. Secara teoritis, hal ini mencerminkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (stakeholder theory) dan upaya perusahaan dalam mempertahankan legitimasi institusional (legitimacy theory).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji pengaruh keterbukaan informasi keberlanjutan dan kepatuhan regulatif terhadap kualitas Sustainability Report perusahaan publik di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pola yang bersifat kausal menggunakan data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari hasil penilaian Sustainability Report oleh lembaga pihak ketiga independen terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk periode tahun 2020, 2021, dan 2022. Data mencakup skor keterbukaan keberlanjutan (Skor KK), skor kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 (Skor POJK), dan total skor kualitas laporan keberlanjutan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang laporan keberlanjutannya dinilai oleh lembaga pihak ketiga selama tiga tahun berturut-turut. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang memiliki data lengkap atas ketiga skor selama periode penelitian. Variabel Dependen penelitian terdiri dari Total Skor Sustainability Report yakni skor keseluruhan penilaian laporan keberlanjutan. Adapun variabel independen terdiri dari skor KK yakni tingkat keterbukaan informasi keberlanjutan dan Skor POJK yakni tingkat kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda (OLS) pada data panel. Teknik pengolahan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Python dengan bantuan pustaka statsmodels dan visualisasi data panel. Langkah analisis meliputi:

- a) Statistik deskriptif variabel per tahun,
- b) Pengujian asumsi klasik:
 - Uji multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF),
 - Uji heteroskedastisitas (Breusch-Pagan test),
 - Uji autokorelasi (Durbin-Watson test).
- c) Pengujian model menggunakan analisis regresi OLS untuk mengetahui pengaruh signifikan dari Skor KK dan Skor POJK terhadap Total Skor laporan keberlanjutan.
- d) Interpretasi hasil menggunakan koefisien regresi, signifikansi statistik (p-value), dan nilai koefisien determinasi (R-squared).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Rata-rata total skor laporan keberlanjutan menunjukkan tren positif dari 0,597 pada tahun 2021 menjadi 0,607 pada tahun 2022. Distribusi skor yang konsisten mengindikasikan peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan publik secara umum.

Tabel 1. Rata-Rata Total Skor Laporan Keberlanjutan

Tahun	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Catatan
2020	≈ 0.571	0.0118	≈ 0.95	Data valid, tapi skor KK seragam
2021	≈ 0.597	≈ 0.35	≈ 0.98	Skor bervariasi dan realistis
2022	≈ 0.607	≈ 0.35	≈ 0.94	Sedikit meningkat dibanding 2021

3.2. Hasil Regresi dan Pengujian Model

Model regresi OLS menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap total skor keberlanjutan. Hasil regresi menunjukkan:

Hasil Regresi: Total Skor SR ~ Skor KK + Skor POJK

Tabel 2. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	p-Value	Kesimpulan
Intercept	0.0804	0.0140	5.76	< 0.00001	Signifikan
Skor KK	1.0702	0.0973	11.00	< 0.00001	Signifikan (***)
Skor POJK	0.5867	0.0426	13.78	< 0.00001	Signifikan (***)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa:

- Skor KK (Keterbukaan Informasi): berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas Sustainability Report. Setiap peningkatan 1 poin skor KK diasosiasikan dengan peningkatan rata-rata 1.07 poin pada total skor pelaporan.
- Skor POJK (Kepatuhan Regulator): juga berpengaruh signifikan. Setiap kenaikan 1 poin skor POJK meningkatkan total skor SR sebesar 0.5867 poin secara rata-rata.
- Intercept: mengindikasikan baseline skor keberlanjutan saat kedua variabel independen bernilai nol.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil lengkap dari uji asumsi klasik dan regresi OLS untuk model $\text{Total_Skor} \sim \text{Skor_KK} + \text{Skor_POJK}$ pada data tahun 2021–2022 mulai dari uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi.

a) Uji Multikolinearitas (VIF)

Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas (VIF)

Variabel	VIF
Intercept	14.89
Skor KK	3.87
Skor POJK	3.87

Berdasarkan Tabel 3, Nilai VIF < 5 artinya tidak terjadi multikolinearitas yang mengganggu antar variabel independen. Nilai VIF untuk Skor KK dan POJK adalah 3,87, di bawah ambang batas 5, menandakan tidak ada indikasi multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan)

Diperoleh nilai LM stat = 3.18, p-value = 0.203 dan F-stat = 1.59, p-value = 0.205

Di mana p-value > 0.05, artinya tidak ada bukti kuat terjadi heteroskedastisitas. Model lolos asumsi varians residual yang konstan. Uji Breusch-Pagan menghasilkan p-value = 0,205 (> 0,05), sehingga model tidak mengalami heteroskedastisitas.

c) Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Dari hasil uji autokorelasi didapatkan nilai DW = 1,91. Nilai mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Model lolos asumsi independensi residual. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,91 mendekati angka ideal 2, menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Nilai koefisiensi dan signifikansi regresi OLS berdasarkan hasil olah data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Koefisiensi dan Signifikansi

Variabel	Koefisien	p-value	Interpretasi
Intercept	0.080	2.47e-08	Signifikan
Skor KK	1.070	3.05e-23	Signifikan positif kuat
Skor POJK	0.587	1.44e-32	Signifikan positif sangat kuat

Berdasarkan Tabel 4, hasil regresi OLS menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keberlanjutan (Skor KK) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap total skor laporan keberlanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi informasi yang disampaikan dalam SR, maka semakin tinggi pula kualitas laporan tersebut sebagaimana dinilai oleh pihak ketiga. Skor KK yang tinggi mencerminkan keterbukaan terhadap isu-isu keberlanjutan, yang merupakan bentuk respons perusahaan terhadap ekspektasi pemangku kepentingan sesuai dengan stakeholder theory.

Sementara itu, skor kepatuhan terhadap regulasi POJK (Skor POJK) juga berpengaruh signifikan terhadap total skor SR. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap ketentuan regulator, dalam hal ini POJK No. 51/POJK.03/2017 menjadi salah satu pendorong utama kualitas pelaporan. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan praktik dan pengungkapannya untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan institusional dan publik. Kombinasi pengaruh positif dari kedua variabel ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan regulatif yang bersifat formal, tetapi juga oleh komitmen perusahaan dalam menyediakan informasi yang terbuka dan akuntabel. Berdasarkan hasil Goodness-of-Fit, didapatkan $R^2 = 0.898$, Adjusted $R^2 = 0.897$. Dapat diinterpretasikan bahwa model mampu menjelaskan 89% variasi skor keberlanjutan berdasarkan keterbukaan informasi dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, hasil ini mendukung kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan teori dan temuan empiris terdahulu.

Temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan validitas empiris stakeholder theory dan legitimacy theory, tetapi juga memperjelas bahwa di konteks negara berkembang seperti Indonesia, keterbukaan informasi bukan sekadar alat komunikasi pasif, melainkan instrumen strategis untuk membangun kredibilitas korporasi. Skor KK, sebagai bentuk transparansi substansial, secara signifikan mendorong skor keberlanjutan total, yang mengindikasikan bahwa pemangku kepentingan semakin sensitif terhadap informasi ESG yang relevan dan terstruktur. Demikian pula, kepatuhan terhadap POJK menunjukkan bahwa regulasi efektif jika disertai pengawasan dan insentif yang mendorong kualitas pengungkapan, bukan sekadar kepatuhan formal.

Refleksi ini penting mengingat tantangan umum dalam praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia, seperti inkonsistensi format, minimnya asurans eksternal, serta adopsi standar GRI yang tidak merata. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan ekosistem pelaporan ESG harus dimulai dari penyusunan laporan yang substantif, terstandar, dan dapat dipercaya yang hanya bisa dicapai melalui keterbukaan informasi yang bermakna dan kepatuhan yang terinternalisasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi keberlanjutan (Skor KK) dan kepatuhan terhadap regulasi POJK (Skor POJK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report perusahaan publik di Indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa kedua variabel berkontribusi besar dalam menjelaskan variasi skor keberlanjutan, dengan nilai R-squared sebesar 0,898. Temuan ini memperkuat peran akuntansi pelaporan berkelanjutan sebagai instrumen strategis dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi perusahaan. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini mendukung stakeholder theory yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Selain itu, legitimasi organisasi dapat ditingkatkan melalui kepatuhan regulatif, sejalan dengan legitimacy theory. Dari sisi praktis, penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi: A. Bagi perusahaan publik: Perusahaan sebaiknya tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan secara formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keterbukaan yang substansial sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. B. Bagi regulator dan pembuat kebijakan: OJK dan instansi terkait dapat memperkuat efektivitas POJK No. 51/POJK.03/2017 melalui mekanisme evaluasi berkala, pelatihan, dan insentif untuk meningkatkan kualitas pelaporan ESG. C. Bagi akademisi dan peneliti: Temuan ini membuka peluang untuk studi lanjutan terkait peran variabel mediasi atau moderasi seperti struktur kepemilikan, asurans eksternal, atau penggunaan standar GRI penuh dalam meningkatkan

kualitas SR. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam mendorong praktik pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola informasi berbasis akuntansi yang kredibel. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, cakupan data terbatas pada periode tiga tahun (2020–2022), dengan pengujian regresi hanya mencakup tahun 2021 dan 2022 karena keterbatasan data Skor POJK pada tahun 2020. Kedua, model analisis belum mempertimbangkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan, yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan. Ketiga, analisis menggunakan pendekatan OLS sederhana tanpa memperluas ke model estimasi panel lanjutan seperti fixed effect atau GMM. Terakhir, pendekatan penelitian sepenuhnya kuantitatif, sehingga belum menangkap perspektif naratif atau motivasional dari pelaporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran untuk penelitian lanjutan adalah: Memperluas cakupan waktu dan sektor, dengan menggunakan data lebih dari lima tahun dan mencakup klasifikasi industri agar dapat menggambarkan dinamika longitudinal dan perbedaan sektoral dalam praktik pelaporan keberlanjutan. Menambahkan variabel kontrol dan moderasi, seperti ukuran perusahaan, leverage, ROA, struktur kepemilikan, serta penerapan GRI atau SDGs secara penuh dalam SR. Menggunakan model panel lanjutan, seperti fixed effect, random effect, atau GMM untuk meningkatkan validitas internal dan menangani potensi bias endogenitas. Mengkaji peran asuransi eksternal dan digitalisasi pelaporan, sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Mengintegrasikan pendekatan kualitatif atau mixed-method, melalui wawancara dengan penyusun SR atau studi kasus, untuk mendalami faktor organisasi dan institusional yang memengaruhi motivasi dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik dan dampak pelaporan keberlanjutan dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Moustafa, M. W. (2021). Social and environmental reporting, sustainable development and institutional voids: Evidence from a developing country. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(2), 881–895.
- Aly, A. W. N., & Badawy, H. A. E. S. (2024). External Assurance on Sustainability Reporting of Listed Companies in the Context of Egypt Vision 2030. 44(2), 263–277.
- Arkoh, P., Costantini, A., & Scarpa, F. (2024). Determinants of sustainability reporting: A systematic literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1578–1597.
- Ates, S. (2021). The alignment of GRI standards with SDGs: A pathway to sustainability reporting in developing countries. *Journal of International Development and Planning*, 42(2), 189–203.
- Bae, J., & Cha, H. (2024). Sustainability reporting and managerial decision quality: Evidence from Asian listed firms. *Journal of Business Research*, 441, 140123.
- Burki, M. A., Loo, W. H., & Saleem, M. A. (2024). ESG disclosure and firm performance in ASEAN: Sectoral insights. *Journal of Cleaner Production*, 441, 140123.
- Damen, M. A. (2016). Quality of sustainability assurance statements: A comparative study. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 515–534.
- Davila, G. A. (2024). Expanding stakeholder theory in digital economies. *Journal of Management and Strategy*, 15(2), 101–118.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dewa, I. G. N., Riyanto, B., & Sari, M. (2024). Institutional barriers to sustainability reporting in ASEAN. *Asian Journal of Sustainability*, 15(3), 111129.
- Dewi, I. P., Safitri, A., & Lestari, S. T. (2023). The effect of financial performance and corporate governance on extensive of disclosure sustainability reporting. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 1(6), 837–854.

- Dossa, Z. (2025). ESG disclosure and profitability in healthcare: Evidence from China. *International Journal of ESG Research*, 8(1), 12–29.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Gutiérrez-Ponce, H. (2023). Sustainability as a strategy base in Spanish firms: Sustainability reports and performance on the sustainable development goals. *Sustainable Development*, 31(4), 3008–3023.
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21.
- Harymawan, I., Nasih, M., Salsabilla, A., & Putra, F. K. G. (2020). External assurance on sustainability report disclosure and firm value: Evidence from Indonesia and Malaysia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(3), 1500–1512.
- Indana, D., & Pangestuti, I. R. D. (2024). Analysis of Financial Characteristics of Sustainability Report: Company Size as Moderating Variable. *Research Horizon*, 4(4), 197–204.
- Khan, A., Shah, S. Z. A., & Javed, A. Y. (2023). GRI adoption and sustainability disclosures in Pakistan: An empirical study. *Sustainability*, 15(9), 7872.
- KPMG. (2022). *Big Shift, Small Steps: Survey of Sustainability Reporting 2022*.
- Laine, M., Tregidga, H., & Unerman, J. (2021). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Mititean, A., & Sărmaș, C. (2023). ESG performance and financial outcomes in European energy sector: A sectoral approach. *Energy Economics*, 122, 106434.
- Nofita, N., Hasanah, H., & Rahman, A. (2024). Corporate governance mechanisms and sustainability report disclosure: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 17(1), 88–103.
- Ogunode, O. A. (2022). Legitimacy theory and environmental accounting reporting and practice: A review. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 13(1), 17–28.
- Okoye, E. I., & Gbegi, D. O. (2013). Forensic accounting: A tool for fraud detection and prevention in the public sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). Okoye, EI & Gbegi, DO (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3), 1–19.
- Pal, R. (2024). Comprehensive sustainability reporting and firm valuation: A global perspective. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 14(2), 215–233.
- Pérez-López, D., Moreno-Romero, A., & Barkemeyer, R. (2015). Stakeholder engagement and sustainable innovation: The role of stakeholder integration in sustainable innovation projects. *Journal of Cleaner Production*, 108, 769–778.
- Permatasari, P., Gunawan, J., & El-Bannany, M. (2020). A Comprehensive measurement for sustainability reporting quality: Principles-based approach. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(2), 249â – 265.
- Tamasiga, A., Kwabena, M., & Zhang, L. (2024). ESG disclosures and financial performance in Sub-Saharan Africa. *Emerging Markets Review*, 38, 100842.
- Wang, J. (2017). Corporate governance and sustainability disclosure: Evidence from Chinese listed companies. *Journal of International Accounting Research*, 16(3), 105–130.
- Wiharno, H., Syarifudin, S., Fitriani, C., & Dina, H. P. (2024). Influence of financial performance, company characteristics and good corporate governance on sustainability reporting disclosure. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 563–572.